

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Demak



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Bhayangkara Baru No.1 Demak, Telp:(0291)685143; Fax:(0291)685378; Web : <http://kab-demak.bpn.go.id/>, Email : bpndemak@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24/Sket.33.21.UP.04.05/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifanto, S.Sos
NIP : 197008211991031005
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Menerangkan bahwa :

Nama : Hana Anisa Dian Pertiwi, S.H
NIM : 11000221410161
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Penelitian : Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Pada Tanah Musnah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Provinsi Jawa Tengah).

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada 20 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023, dengan narasumber :

1. Nama : Sujadi S.T., A.Ptnh.
NIP : 196512181986031004
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
2. Nama : Mohammad Aulia Ilman, S.Si, M.P.W.K.
NIP : 198806092011011003
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 23 Februari 2023
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani
secara elektronik

Arifanto, S.Sos
NIP 197008211991031005



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

v 1.04

Melayani, Profesional, Terpercaya

Lampiran 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/52 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/52 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL SEMARANG DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani kawasan utara Jawa dengan tingkat intensitas kepadatan lalu lintas yang tinggi perlu dibangun jalan tol Semarang Demak sehingga dapat meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional, nasional maupun internasional;
- b. bahwa guna kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang Demak, perlu dilakukan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

- Memperhatikan : a. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2016 Nomor: TN 13.3/440357/037/VII/2016-26 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak
- b. Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Di Kabupaten Demak, tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 590/0016907;

- c. Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Di Kota Semarang, tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 590/0016920;
- d. Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak di Kabupaten Demak Tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 590/0017925;
- e. Berita Acara Konsultasi Publik Ulang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak di Kota Semarang tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 590/0017946.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak sepanjang ± 24 km (dua puluh empat kilo meter) dan seluas $\pm 1.897.000$ m² (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu meter persegi), sebagai berikut:

- a. data lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
- b. peta persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Persetujuan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan persetujuan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Demak
- b. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya;

- f. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2016



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Walikota Semarang;
14. Bupati Demak;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

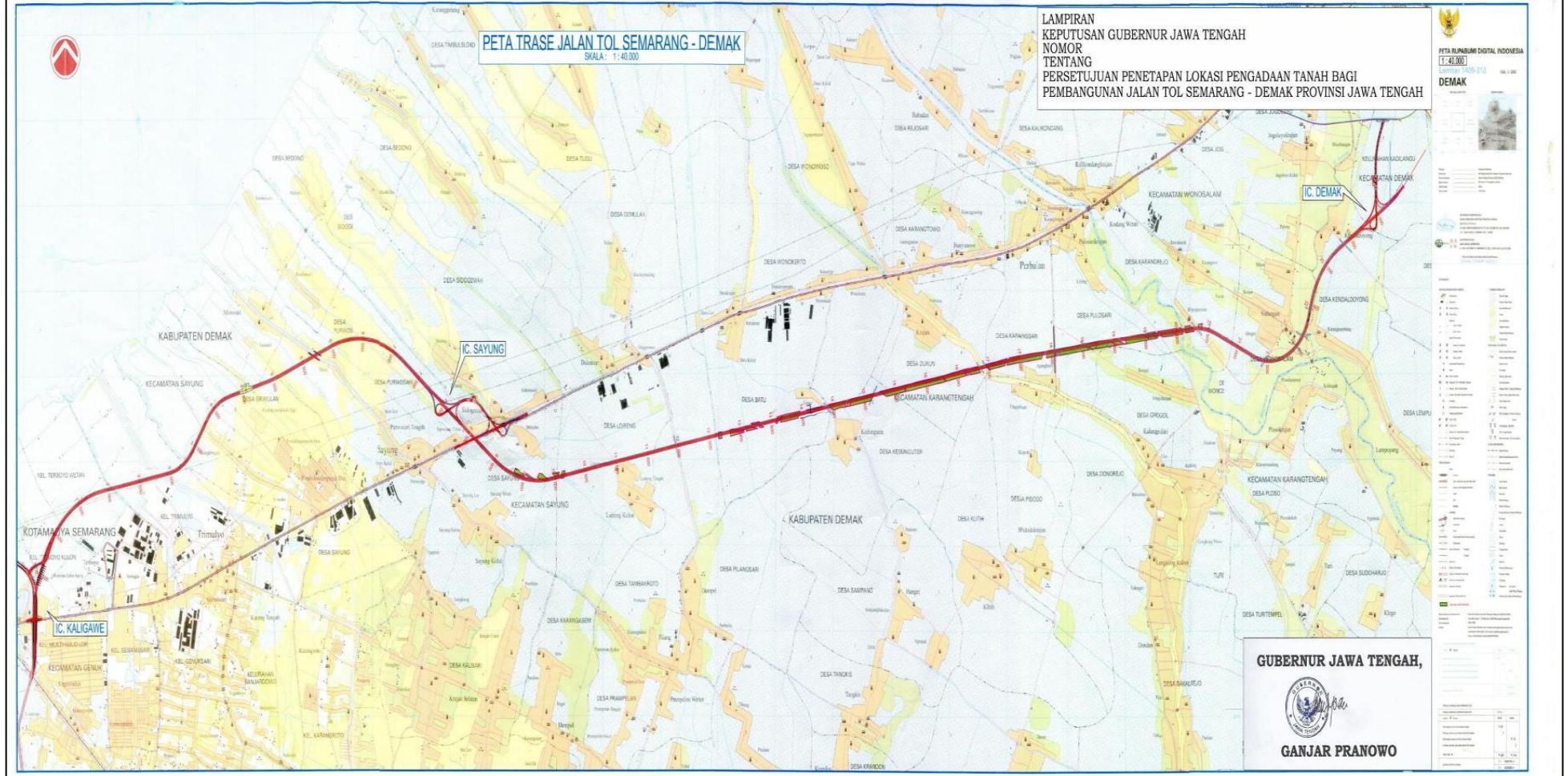
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/52 TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
SEMARANG DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
SEMARANG DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOTA/KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	KOTA SEMARANG	1. GENUK	1. KELURAHAN TERBOYO WETAN 2. KELURAHAN TERBOYO KULON 3. KELURAHAN TRIMULYO
2	KABUPATEN DEMAK	1. SAYUNG 2. KARANG TENGAH 3. WONOSALAM 4. DEMAK	1. DESA SRIWULAN 2. DESA BEDONO 3. DESA PURWOSARI 4. DESA SIDOGEMAH 5. DESA SAYUNG 6. DESA LOIRENG 7. DESA TAMBAKROTO 1. DESA BATU 2. DESA WONOKERTO 3. DESA KEDUNGUTER 4. DESA DUKUN 5. DESA KARANGSARI 6. DESA PULOSARI 7. DESA GROGOL 1. DESA KARANGREJO 2. DESA WONOSALAM 3. DESA KENDALDOYONG 1. KELURAHAN KADILANGU



PETA PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH



**Lampiran 4. Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/38 Tahun 2018
Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol
Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah**



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

NUMBER 590/38 YEAR 2018

ABOUT

**CHANGE OF GOVERNOR OF CENTRAL JAVA DECISION NUMBER 590/52
YEAR 2016 ABOUT APPROVAL OF LOCATION OF LAND ACQUISITION
FOR THE CONSTRUCTION OF SEMARANG-DEMAK TOLL ROAD PROVINCE
CENTRAL JAVA**

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya rencana pengintegrasian dengan tanggul laut guna penanggulangan banjir Rob dan abrasi wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak bagian barat, Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah - Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 119);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 355 KPTS/M/2017 tentang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
 3. Surat Plt Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor PR 01.02-Db/162 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Permohonan Revisi Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul laut Kota Semarang;
 4. Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang, tanggal 8 Maret 2018 Nomor 590/811;
 5. Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di kabupaten Demak, tanggal 8 Maret 2018 Nomor 590/812;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa penambahan lahan seluas ± 346 Ha (tiga ratus empat puluh enam hektar) dari semula seluas ± 189 Ha (seratus delapan puluh Sembilan hektar) menjadi seluas ± 535 Ha (lima ratus tiga puluh lima hektar), sebagai berikut:

- a. data lokasi pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

- b. peta persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2018
PIK GUBERNUR JAWA TENGAH,

HERU SUDJATMOKO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Demak;
16. Walikota Semarang;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/38 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 590/52 TAHUN 2016 TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	KOTA SEMARANG	GENUK	1. TERBOYO KULON 2. TERBOYO WETAN 3. TRIMULYO
2	KABUPATEN DEMAK	SAYUNG	1. SRIWULAN 2. BEDONO 3. PURWOSARI

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,


HERU SUDJATMOKO

**Lampiran 5. Pembaruan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/59 Tahun 2019
Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah**



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/59 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBARUAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah dan telah diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/66 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, penetapan lokasi yang telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, dilakukan pembaruan penetapan lokasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0202-Db/909 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Pembaharuan Penetapan Lokasi untuk Ruas jalan Tol Semarang - Demak;

2. Berita Acara Rapat Nomor 590/2193 tanggal 11 Oktober 2019 membahas Permohonan Pembaharuan Penetapan Lokasi Untuk Ruas Jalan Tol Semarang Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Pembaruan atas penetapan lokasi sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Demak;
15. Walikota Semarang;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.

PETA PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran 6. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah

RISALAH TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

Nomor : 5/HP.01.03/I/2022

Tanggal 11 Januari 2022



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
2022**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

RISALAH TIM PENELITI TANAH MUSNAH
NOMOR : 5/HP.02.03/I/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	a. Nama b. NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	a. Bambang Irjanto, A. Ptnh., MM 19720228 199103 1 002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Ketua
2.	a. Ahmad Nur Wahyundi, SH., M.Kn b. 196209252989031011	Asisten Bupati Kabupaten Demak yang membidangi pemerintahan	Anggota
3.	a. Ahmad Kumaedi, S.SiT b. 197307261994031004	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Anggota
4.	a. Akhmad Sugiharto, ST., MT b. 197305171998031007	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Demak	Anggota
5.	a. Sri Rejeki, SH., M.Kn b. 196906111994032002	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Anggota
6.	a. Anzirwan Nur aziz., A.Ptnh b. 196403241986031004	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Anggota
7.	a. Abdul Rohman, S.Sos.,M.H b. 19691027 198903 1 001	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kabupaten Demak	Anggota

8.	a. Santosa, SP b. 196808121990031007	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak	Anggota
9.	a. Eko Ariyanto, AP,M.Kom b. 197608091995111001	Kepala Seksi Pemeliharaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak	Anggota
10.	a. Rofi'i, ST.MT b. 197003051997111001	Kepala Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak	Anggota
11.	a. Drs. Daryanto., M.M b. -	Plt. Camat Sayung	Anggota
12.	a. Agus Salim b. -	Kepala Desa Bedono	Anggota
13.	a. Nur Cholis b. -	Kepala Desa Purwosari	Anggota
14.	a. Zamroni b. -	Kepala Desa Sriwulan	Anggota
15.	a. Aditya Andang Permana, SH., M.H b. 198501172009031003	Koordinator Penetapan Hak dan Pengelolaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Sekretaris I
16.	a. Mohammad Arief Ramadhan Putra b. -	PPNPN Survei dan Pemetaan	Sekretaris II
17.	a. Ade Safriani Machfiroh b. -	PPNPN Tata Usaha	Sekretaris III

Secara Bersama-sama merupakan anggota Tim Peneliti Tanah Musnah yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kantor Pertanahan Kabupaten Demak tanggal Nomor 601/SK-33.21.HP.01.04/X/2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 6 September 2021 Nomor : 666/SK-33.21.HP.01.04/IX/2021, telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian atas Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi.

I. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 722).

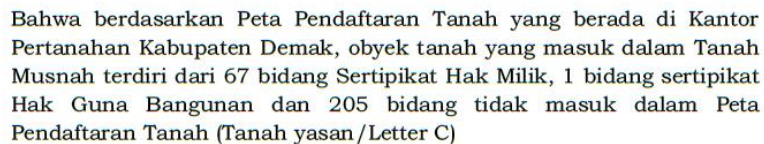
II. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH

Tanah yang menjadi objek penetapan tanah musnah adalah tanah yang telah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi dan tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang terletak di Desa Sriwulan, Desa Bedono dan Desa Purwosari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor 600/SK-33.21.HP.01.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah Yang Terindikasi Musnah.

Adapun objek penetapan tanah musnah berdasarkan jenis Hak Atas Tanahnya adalah Hak Milik sebanyak 67 bidang, Hak Guna Bangunan sebanyak 1 bidang. Sementara itu, bidang tanah yang masih berupa Tanah Yasan atau *Letter C* sebanyak 205 bidang.

III. URAIAN ATAS DATA PENDUKUNG TANAH MUSNAH

1. Peta pendaftaran tanah;



- [illegible]

4

Berdasarkan RTRW/ RDTR Kabupaten Demak tahun 2011-2031, penggunaan tanah di dalam area *Right of Way* (ROW) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak adalah :

- a. Kawasan Ekosistem Mangrove;
- b. Kawasan Peruntukan Industri.

3. Peruntukan/Penggunaan Tanah yang tertuang dalam Buku Tanah/Sertipikat/Surat Ukur;

Bahwa berdasarkan hasil identifikasi bidang tanah, pada saat penerbitan sertipikat digunakan untuk pertanian (Sawah), namun pada saat peninjauan lapangan berdasarkan Berita Acara Lapang Nomor 923/HP.02.03/IX/2021 tanggal 20 Desember 2021 penggunaan tanah telah berubah menjadi tergenang air laut dan sebagian kecil untuk tambak. Jumlah bidang tanah yang terdaftar/bersertipikat 60 Bidang yang penggunaan tanahnya untuk pertanian. (*data terlampir*)

4. Hasil Penelitian lapangan :

- a. Perubahan dari bentuk/wujud/keadaan fisik tanah asalnya karena peristiwa alam.

Pada saat penerbitan sertipikat di area tersebut mayoritas dipergunakan untuk pertanian. Berdasarkan citra *googleearth* sampai dengan tahun 1994 penggunaan tanah masih sesuai dengan yang tertera disertipikat (Pertanian sawah). Perbandingan foto citra dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2020 terjadinya perubahan penggunaan tanah yang sebelumnya pertanian dan tambak menjadi tergenang air laut sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1. Citra *GoogleEarth* Tahun 1994



Gambar 2. Citra *GoogleEarth* tahun 2005



Gambar 3. Citra *GoogleEarth* Tahun 2014



Gambar 4. Citra *GoogleEarth* tahun 2017



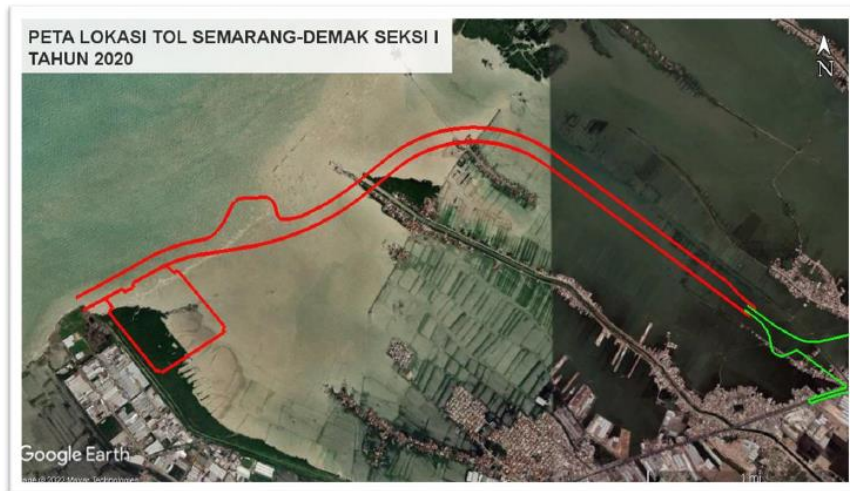
Gambar 5. Citra *GoogleEarth* tahun 2018



Gambar 6. Citra *GoogleEarth* tahun 2019



Gambar 7. Citra *GoogleEarth* tahun 2020



Gambar 8. Citra *GoogleEarth* tahun 2021



Gambar 9. Citra *GoogleEarth* tahun 2022



- b. Identifikasi batas-batas bidang tanah
Pada saat ini batas bidang tanah sebagian besar tergenang air laut dengan batas :
 - 1. Tidak ada batas bidang tanah 243 bidang
 - 2. Terdapat batas bidang tanah sebagian 13 bidang
 - 3. Terdapat batas bidang tanah 17 bidang.
- c. Pada saat peninjauan lapangan bidangan telah berubah fungsi yang dahulu lahan pertanian (sawah) saat peninjauan lapang menjadi tergenang air laut dan sebagian tambak. *(data terlampir)*

IV. Peristiwa/penyebab bidang tanahnya musnah.

Penyebab terjadinya bidang tanah musnah adalah karena rob (naiknya permukaan air laut) dan *land subsidence* (turunnya permukaan tanah).

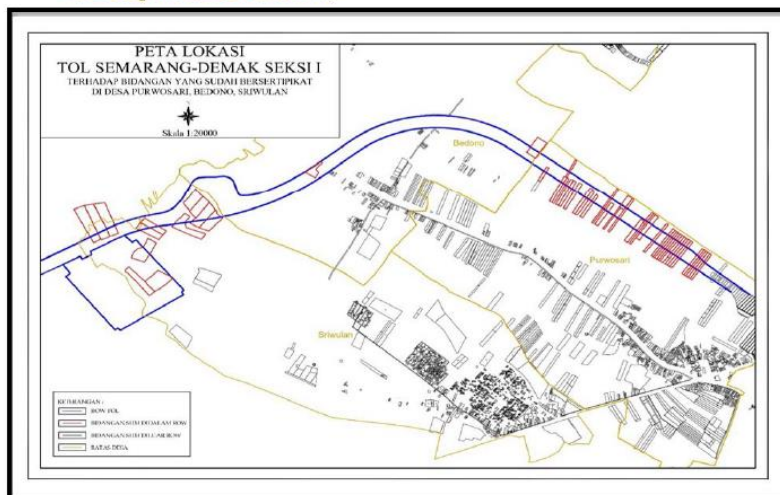
V. PENGKAJIAN ATAS TANAH MUSNAH

1. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6630);
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
- f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 722).

2. Peta pendaftaran tanah;



3. Peruntukan/Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW/RDTR;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 sebagian besar bidang tanah yang masuk didalam ROW berada dalam Kawasan Industri dan Ekosistem Mangrove.

- Dahulu obyek bidang tanah yang terindikasi musnah di Desa Purwosari berupa tanah pertanian (sawah). *(data foto citra tahun 1994)*.
- Pada saat peninjauan lapangan tanah yang menjadi obyek tanah terindikasi musnah sudah tergenang air laut dan Sebagian kecil digunakan untuk pertanian (tambak).
- Pada saat peninjauan lapang batas bidang tanah sebagian besar sudah tidak ditemukan (bidang nomor 1 sampai dengan nomor 97), dan Sebagian kecil terdapat batas bidang tanah (bidang Nomor 98 sampai dengan bidang nomor 113), *(data terlampir)*

2) Desa Bedono

- Terdapat 113 bidang yang masuk dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor 600/SK-33.21.HP.01.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang terindikasi musnah.
- Dari total 113 bidang terdiri dari 7 bidang telah terbit sertifikat, 106 bidang masih berupa hak yasan/Letter c.
- Dahulu obyek bidang tanah yang terindikasi musnah di Desa Bedono berupa tanah pertanian (sawah). *(data foto citra tahun 1994)*.
- Pada saat peninjauan lapangan tanah yang menjadi obyek tanah terindikasi musnah sudah tergenang air laut dan Sebagian kecil digunakan untuk tempat tinggal dan bangunan Sekolah.
- Pada saat peninjauan lapang batas bidang tanah :
 - a) Batas bidang tanah tidak ditemukan sebanyak 99 bidang (bidang nomor 1-26, 35-59, 66-101, 105-110, 111, 113). *(data terlampir)*
 - b) batas bidang tanah ada Sebagian sebanyak 13 bidang (bidang Nomor 27-33, 60-65. *(data terlampir)*
 - c) batas bidang tanah masih ada, sebanyak 1 bidang (bidang nomor 34). *(data terlampir)*

3) Desa Sriwulan

- Terdapat 47 bidang yang masuk dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor 600/SK-33.21.HP.01.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Lokasi

Tanah yang terindikasi musnah.

- Dari total 47 bidang terdiri dari 22 bidang telah terbit sertifikat, 25 bidang masih berupa hak yasan/Letter c.
- Dahulu obyek bidang tanah yang terindikasi musnah di Desa Sriwuln berupa tanah pertanian (sawah). (*data foto citra tahun 1994*).
- Pada saat peninjauan lapangan tanah yang menjadi obyek tanah terindikasi musnah sudah tergenang air laut.
- Pada saat peninjauan lapang batas bidang tanah sudah tidak ditemukan.
- Pada saat peninjauan lapang Sebagian terdapat waring yang berada di Kolam Retensi, namun batas waring tersebut terdiri dari beberapa bidang.
- Pada saat peninjauan lapang batas bidang tanah tidak ditemukan sebanyak 47 bidang (bidang nomor 1-47). (*data terlampir*)

c. Pada saat tinjau lapangan batas bidang tanah :

1. Tidak ada batas bidang tanah 243 bidang;
2. Terdapat batas bidang tanah sebagian 13 bidang;
3. Terdapat batas bidang tanah 17 bidang.

d. Perubahan Fungsi, penggunaan dan pemanfaatan dari kondisi (*data terlampir*)

e. Peristiwa/penyebab bidang tanahnya musnah

Penyebab tanah musnah disebabkan oleh penurunan muka tanah atau *land subsidince*.

f. Pertimbangan Tim Peneliti Tanah Musnah :

1) Bambang Irjanto, A.Ptnh., MM

- Pada Saat peninjauan lapang bidang tanah di Desa Purwosari, Desa Bedono dan Sriwulan sudah berubah fungsi, yang semula tanah pertanian (sawah) telah berubah menjadi tanah yang tergenang air laut.
- Terdapat beberapa bidang tanah yang dimanfaatkan untuk tambak namun Sebagian besar tidak diusakan (tergenang air laut)

2) Ahmad Nur Wahyundi, SH., M.Kn

- Bidang tanah yang terindikasi musnah pada saat peninjauan lapang sudah tergenang air laut.
- Batas bidang tanah sebagian besar tidak ditemukan.

3) Akhmad Sugiharto, ST., MT

- Bidang tanah yang terindikasi musnah pada saat peninjauan lapang sudah tergenang air laut.
- Batas bidang tanah sebagian besar tidak ditemukan.

- 4) Akhmad Kumaedi, A.Ptnh
 - Bidang tanah yang terindikasi musnah pada saat peninjauan lapang sudah tergenang air laut yang kedalamannya bervariasi.
 - Batas bidang tanah sebagian besar tidak ditemukan.
- 5) Sri Rejeki SH., M.Kn
 - Pada saat peninjauan lapang sudah tidak bisa di Identifikasi karena batas bidang tanah tidak ada.
 - Pada saat peninjauan lapang bidang tanah tergenang air laut.
 - sudah berubah fungsi, yang semula tanah pertanian (sawah) telah berubah menjadi tanah yang tergenang air laut.
- 6) Anzirwan Nur aziz., A.Ptnh
 - Tata Ruang wilayah di Desa Purwosari, Bedono dan Sriwulan merupakan Kawasan Ekosistem Magrove dan Kawasan Industri.
 - Pada saat peninjauan lapang, tanah sudah tergenang air laut.
- 7) Drs. Daryanto., M.M
 - Pada saat Peninjauan Lapang tanah yang menjadi obyek tanah terindikasi musnah sudah tergenang air laut.
 - Pada saat peninjauan lapang batas bidang tanah Sebagian besar tidak ditemukan.
- 8) Abdul Rohman, S.Sos.,M.H
 - Bidang tanah yang terindikasi musnah pada saat peninjauan lapang sudah tergenang air laut.
 - Batas bidang tanah sebagian besar tidak ditemukan.
 - Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 - **Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi:**
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 - **Pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi:**
Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
 - **Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi:**
Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan
Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi:
Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 - **Budidaya Ikan/ Udang sistem terbuka** adalah Sistem dimana inlet dan outlet air/dinding kolam terbuka sehingga sumber air dapat mengalir secara terus menerus masuk dan keluar dalam

- sistem budidaya. Contohnya: Empang/tambak terbuka (Keramba jaring apung).
- **Budidaya Ikan/Udang Sistem tertutup** adalah penggunaan Kembali air pembuangan dari hasil limbah atau kotoran pemeliharaan udang yaitu melalui proses filtrasi melalui petak-petak tandon. Filtrasi air dapat dilakukan dengan proses fisika, kimia, dan biologis pada setiap tahapan tandon air.
 - **Tanaman bakau** adalah salah satu tempat yang nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme contohnya udang, ikan, dan kepiting. Dan merupakan jenis yang dominan yang Menyusun ekosistem mangrove dan umum ditemukan di garis pantai yang cenderung lebih dekat dengan laut.
 - **Karamba Jaring Tancap (KJT)** merupakan jaring kantong dalam bentuk persegi yang dipasang dalam kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan pasangan kayu atau bambu seperti pagar.
 - Menurut Ahmad *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa **Tambak adalah** kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang serta kerrang, biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.
 - **Tambak merupakan** kolam yang di bangun di daerah pasang surut dan digunakan untuk memelihara bandeng, udang laut dan hewan lainnya yang biasa hidup di air payau (Martosudarmo dan Bambang, 1992)
 - **Tambak Merupakan** genangan air laut dan sungai yang dibatasi oleh pematang-pematang dan dapat diatur melalui pintu air serta digunakan untuk usaha budidaya bandeng, udang dan hasil perikanan lainnya (Poernomo, 1985)
 - Keberhasilan budidaya udang ditambak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan pertambakan yang memenuhi persyaratan baik fisik, kimia, dan biologi serta faktor-faktor sosial disekitar tambak. Untuk mendapatkan lahan yang memenuhi persyaratan tersebut perlu dilakukan perencanaan menyeluruh sebelum dilakukan usaha yang mencakup dua kegiatan yaitu penentuan areal yang memenuhi syarat yang dijadikan tambak dan konstruksi tambak (Afrianto dan Evil, 1991)
 - **Tambak atau kolam** menurut Biggs *et al.* (2005) adalah badan air yang berukuran 1 m² hingga 2 ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami atau buatan manusia.
 - Menurut Nuryadi *et al.* (2009) bahwa **Budidaya ikan sistem tertutup** yaitu pengairan untuk kolam pemeliharaan diberikan hanya satu kali saja yakni pada saat pemeliharaan akan dilaksanakan, pemasukan air berikutnya dilakukan hanya untuk mengganti air yang hilang karena penguapan saja. Contoh sistem ini adalah teknik akuaponik dan fitoremediasi. **Budidaya ikan sistem terbuka** yaitu pengairan dilakukan secara terus-menerus selama pemeliharaan berlangsung. Contoh sistem ini adalah budidaya pada kolam mengalir dan air deras.
 - Menurut Imran (2016), **ekosistem hutan mangrove** merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi, dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. Materi organik menjadikan hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan berbagai biota seperti ikan, udang dan kepiting.

- **Mangrove/Bakau** adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi/dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut, misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik/farmasi atau bahan tambahan tekstil (Dirjen P2HP, 2015).
- Keramba Jaring Apung merupakan rangkaian kerangka terapung untuk menempatkan jaring wadah budidaya. Keramba Jaring Tancap merupakan rangkaian kerangka kayu yang ditancapkan ke dasar perairan guna guna mengikat jaring sebagai wadah budidaya (Subachri *et al.*, 2011)

9) Rofi'i, ST.MT

- Bidang tanah yang terindikasi musnah pada saat peninjauan lapang sudah tergenang air laut.
- Batas bidang tanah sebagian besar tidak ditemukan.
- Pada saat peninjauan lapang Ketika diukur kedalamannya hanya ± 80-120 cm.

10) Eko Ariyanto, AP, M. Kom

- Pada saat peninjauan lapang obyek tanah terindikasi musnah sudah tergenang air laut.
- Terjadinya abrasi tinggi yang mengakibatkan pergeseran garis pantai.
- Dampak air rob di wilayah Desa Bedono, Purwosari, Sriwulan terhadap pemukiman penduduk mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh dan tergenang air laut setiap hari.
- Kawasan mangrove di sekitar Wilayah Desa Bedono dan Sriwulan rusak akibat gelombang air laut yang tinggi.

11) Nur Cholis

- bahwa menurut pak Nur Cholis selaku kepala Desa Purwosari bidang tanah yang terindikasi musnah tidak ada, karena tanah tersebut masih bisa difungsikan masyarakat untuk mata pencarian/Tambak.

12) Agus Salim

- Bahwa menurut Pak Agus Salim selaku kepala Desa Bedono bidang tanah yang terindikasi musnah tidak ada, karena tanah tersebut masih bisa difungsikan masyarakat untuk mata pencarian, pariwisata, budidaya kerang hijau dan pertambakan.

13) Zamroni

- Bahwa menurut bapak Zamroni selaku Kepala Desa Sriwulan bidang tanah masih difungsikan untuk mata pencarian, budidaya kerang, udang, rumpon, tambak dan Pariwisata semua masih digunakan untuk mata pencarian masyarakat.

14) Aditya Andang Permana, SH., MH

- Pada saat peninjauan lapangan tanah di Desa Purwosari, Bedono dan Sriwulan kondisinya tergenang air laut.
- Tanda batas bidang tanah banyak yang tidak ditemukan.

VI. KESIMPULAN

1. Bahwa atas bidang tanah yang dilekati Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang **akan ditetapkan** sebagai tanah musnah adalah sebagai berikut : (data terlampir)
 - a) Hak Milik 67 bidang;
 - b) Hak Guna Bangunan 1 bidang;
 - c) Hak Yasan/Letter c 205 bidang.

2. Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan keadaan fisik Bidang Tanah telah musnah seluruhnya/musnah sebagian/tidak musnah sebagai berikut :

- a) Terindikasi tidak musnah 17 bidang; *(data terlampir)*
- b) Terindikasi Musnah Sebagian 13 bidang; *(data terlampir)*
- c) Terindikasi Musnah seluruhnya 243 bidang. *(data terlampir)*

3. Bahwa menurut :

- a) Kepala Desa Purwosari bapak Nur Cholis bidang tanah yang terindikasi musnah tidak ada, karena masih difungsikan sebagai mata pencarian (budidaya Kerang hijau, kerang dara, pertambakan, Pemancingan, rumpon dan Pariwisata.
- b) Kepala Desa Bedono bapak Agus Salim bidang tanah yang terindikasi musnah tidak ada, karena masih difungsikan sebagai mata pencarian (budidaya Kerang hijau, kerang dara, pertambakan, Pemancingan, rumpon dan Pariwisata.
- c) Kepala Desa Bedono dan Kepala Desa Purwosari hingga sampai saat ini tidak mau menanda tangani, karena pendapat anggota tim yang lainnya masih merugikan masyarakat sekitar.
- d) Kepala Desa Sriwulan bapak Zamroni hingga sampai saat ini tidak mau menanda tangani, karena bidang tanah masih difungsikan untuk mata pencarian, budidaya kerang, udang, rumpon, tambak dan Pariwisata semua masih digunakan untuk mata pencarian masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bidang-bidang tanah sebagaimana daftar terlampir yang telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif dapat ditetapkan sebagai tanah musnah.

VII. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Bidang Tanah sebagaimana daftar terlampir direkomendasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk ditetapkan sebagai tanah musnah. Demikian Risalah ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rrealatn

ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

1. Bambang Irjanto, A. Ptnh., MM
NIP. 19720228 199103 1 002
2. Ahmad Nur Wahyundi, SH., M.Kn
NIP. 196209252989031011
3. Ahmad Kumaedi, S.SiT
NIP. 197307261994031004
4. Akhmad Sugiharto, ST., MT
NIP. 197305171998031007
5. Sri Rejeki, SH., M.Kn
NIP. 196906111994032002
6. Anzirwan Nur aziz., A.Ptnh
NIP. 196403241986031004
7. Abdul Rohman, S.Sos.,M.H
NIP. 19691027 198903 1 001
8. Santosa, SP
NIP. 196808121990031007
9. Eko Ariyanto, AP,M.Kom
NIP. 197608091995111001
10. Rofi'i, ST.MT
NIP. 197003051997111001
11. Drs. Daryanto., M.M
NIP.
12. Agus Salim.
13. Nur Cholis
14. Zamroni
15. Aditya Andang Permana, SH., MH
NIP. 198601172009031003

()

()

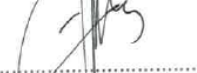
()

()

()

()

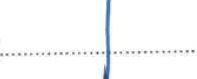
()

()

()

()

()

()

()

()

()

Lampiran
Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah

**REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK**

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (Jenis dan Nomor Hak)	Uraian Objek					Penggunaan / Pemanfaatan Sesuai Buku Tanah	Catatan Pendaftaran		Kedudukan Tanah Saat Ini (terindikasi)	Luas Tanah Yang terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)	Keterangan
			No. SU	NIB	Desa/Kel	Kecamatan	Luas ± (m ²)		Pembebanan Hak Atas Tanah	Stokir/Stra/Parkara			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PURWOSARI													
1	Marjuki	C. 759 P. 4 S.IV			Purwosari	Sayung	3.929	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	426	
2	Yathmah	C. 1008 P.58 S.V			Purwosari	Sayung	7.603	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.775	
3	Sartono	C. 1045 61 S.V			Purwosari	Sayung	9.705	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.845	
4	Siti Alisah	C.771 P. 58 S.V			Purwosari	Sayung	10.115	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.596	
5	Saff'i alm (Fauzi anak)	C.975 P.45 S.IV			Purwosari	Sayung	4.300	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	4.192	
		HM.329	GS.01440/1987										
		HM.330	GS.01441/1987										
6	Sartono	C. 1247 P. S.V			Purwosari	Sayung	6.489	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.029	
7	Saff'i alm (Fauzi anak)				Purwosari	Sayung	3.213	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.051	
8	Sukawi Sutarip	C. 940 P.2 S.V C.1060 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	7.548	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	3.421	
9	Tiyari	C. 1463 P. 8 D.V			Purwosari	Sayung	5.714	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.053	
10	M. Muchlis	C. 998 P.4 S.IV			Purwosari	Sayung	5.066	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	997	
11	M. Muchlis	C. 756 P.58 b S.V			Purwosari	Sayung	4.643	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.357	
12	Sartono	C.1247 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	3.977	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.477	
13	Murtaslah	C.1285 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	6.624	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.168	
14	Cholli	C.761 P. S.V			Purwosari	Sayung	4.596	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.108	

15	H. Achmad Nur	C. 1286 P.1 S.V			Purwosari	Sayung	5.671	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.106	
16	H. Achmad Nur	C. 1316 P.6 S.V			Purwosari	Sayung	4.864	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.159	
17	Bondo Desa	HM. 1017	192/Purwosari/2008	1109051400399	Purwosari	Sayung	4.658	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.191	
18	Bondo Desa	C.548 P.45 S.II			Purwosari	Sayung	2.750	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	810	
19	Hj. Mujiatun	HM. 919	122/Purwosari/2008	1109051400248	Purwosari	Sayung	5.427	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.284	
20	H. Ahmad Nur	HM. 1013	188/Purwosari/2008	1109051400395	Purwosari	Sayung	2.153	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	717	
21	H. Ahmad Nur	C. 548 P.45 S.II			Purwosari	Sayung	2.750	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	945	
22	Nabrowi	C. 1004 P.1 S.V		1109051400250	Purwosari	Sayung	5.375	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.129	
23	Hj. Mujiatun	HM. 922	124/Purwosari/2008		Purwosari	Sayung	5.562	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	911	
24	Mat Sa'an	C. 1272 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	8.080	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.060	
25	Nuryanto	HM. 849	034/Purwosari/2008	1109051400334	Purwosari	Sayung	5.801	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.564	
26	Kaswadi	HM. 1036	215/Purwosari/2008	1109051400422	Purwosari	Sayung	4.294	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.743	
27	Mat Sa'an	C. 1273 P.1 S.V			Purwosari	Sayung	1.916	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	556	
28	H. Achmad Nur	C. 1489 P.79a D.II			Purwosari	Sayung	8.173	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.014	
29	Mustofa	C. 585 P.3 S.III			Purwosari	Sayung	2.010	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.809	
30	H. Achmad Nur	HM. 1016	191/Purwosari/2008	1109051400398	Purwosari	Sayung	4.869	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.154	
31	Muzamil	C. 255 P.58 S.V			Purwosari	Sayung	5.696	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.858	
32	Muktafin	C. 1504 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	11.836	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	3.175	
33	Sonah	C. 1073 P2. S.V			Purwosari	Sayung	5.523	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.912	
34	H. Achmad Nur	C. 598 P.13 S.V			Purwosari	Sayung	5.436	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	473	
35	Chayun	C. 324 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	1.659	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	124	
36	H. Achmad Nur	C. 598 P.13 S.V			Purwosari	Sayung	1.550	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	338	
37	H. Achmad Nur	HM. 730	101/05.14/2005	1109051400104	Purwosari	Sayung	6.569	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.373	

38	H. Achmad Nur	HM. 732	102/05.14/2005	1109051400105	Purwosari	Sayung	5.688	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.906	
39	H. Achmad Nur	C. 959 P.57 S.IV			Purwosari	Sayung	5.400	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	561	
40	H. Achmad Nur	C.959 P.57 S.IV			Purwosari	Sayung	5.400	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.029	
41	Chayun	C. 324 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	5.300	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.763	
42	H. Achmad Nur	HM. 731	103/05.14/2005	1109051400106	Purwosari	Sayung	5.120	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.331	
43	H. Achmad Nur	C. 383 P.78 S.II			Purwosari	Sayung	3.524	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	799	
44	Sukawi	C. 353 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	2.282	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	625	
45	H. Achmad Nur	C. 353 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	2.785	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	720	
46	Muslimah	C. 765 P.5 S.III			Purwosari	Sayung	5.911	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.622	
47	Muslimah	C. 1153 P.4 S.V			Purwosari	Sayung	3.667	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.978	
48	Ahmadi	C. 707 P.5 S.V			Purwosari	Sayung	4.301	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.513	
49	H. Achmad Nur	C. 707 P.5 S.V			Purwosari	Sayung	3.290	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.587	
50	Ahmadi	C. 1350 P.1 S.V			Purwosari	Sayung	5.372	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.531	
51	Hj. Mujiatun	HM. 968	113/Purwosari/2008	1109051400239	Purwosari	Sayung	5.101	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.513	
52	Sukawi Sutarip	C. 1211 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	1.889	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	491	
53	H. Achmad Nur	C. 1211 P.2 S.V			Purwosari	Sayung	3.427	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.218	
54	Hj. Mujiatun	HM. 926	128/Purwosari/2008	1109051400254	Purwosari	Sayung	6.820	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2206	
55	Mutamakin	C. 773 P.1 S.IV			Purwosari	Sayung	3.930	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	887	
56	H. Achmad Nur	C. 579 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	5.979	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.353	
57	H. Achmad Nur	C. 579 P.5 S.III			Purwosari	Sayung	3.462	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.229	
58	H. Achmad Nur	C. 945 P.49 S.V			Purwosari	Sayung	3.144	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.317	
59	H. Achmad Nur	C. 1025 P.1 S.V			Purwosari	Sayung	3.386	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.229	
60	H. Achmad Nur	HM. 737	105/05.14/2005	1109051400108	Purwosari	Sayung	3.236	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.161	

61	H. Achmad Nur	HM. 738	104/05.14/2005	1109051400107	Purwosari	Sayung	5.453	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.069	
62	H. Achmad Nur	C. 563 P.7 S.V			Purwosari	Sayung	3.630	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.138	
63	H. Achmad Nur	C. 971 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	3.581	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.279	
64	H. Achmad Nur	HM. 1020	195/Purwosari/2008	1109051400402	Purwosari	Sayung	5.443	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.819	
65	Nur Cholis	C. 701 P.49 S.V			Purwosari	Sayung	5.526	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.817	
66	H. Achmad Nur	C. 1530 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	4.960	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.581	
67	H. Achmad Nur	C. 954 P.5 S.III			Purwosari	Sayung	5.389	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.834	
68	Sukawi Sutarip	C.1115 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	11.000	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	4.963	
69	Sukawi Sutarip	C.1568 P.4 S.V			Purwosari	Sayung	5.400	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.633	
70	Sukawi Sutarip	C.73 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	5.500	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.568	
71	MunchoTimah	C.1207 P.8 D.V			Purwosari	Sayung	5.200	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.771	
72	H. Achmad Nur	C. 1084 P.1 S.V			Purwosari	Sayung	3.559	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	365	
73	Hj. Mujlatun	HM. 923	125/Purwosari/2008	1109051400251	Purwosari	Sayung	6.675	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	3104	
74	H. Achmad Nur	HM. 736	106/05.14/2005	1109051400109	Purwosari	Sayung	2.108	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	492	
75	H. Achmad Nur		197/1992		Purwosari	Sayung		Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.378	
76	H. Achmad Nur	HM. 735	107/05.14/2005	1109051400110	Purwosari	Sayung	4.735	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.517	
77	Sumirat Bin Kasman	HM. 282	1606/1985		Purwosari	Sayung	9.081	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	3.622	
78	H. Achmad Nur	C. 934 P.5 S.II			Purwosari	Sayung	5.014	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.946	
79	H. Achmad Nur	C. 1314 P.4 S.V			Purwosari	Sayung	5.051	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.846	
80	H. Achmad Nur	C. 77 P.60 S.II			Purwosari	Sayung	5.021	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.771	
81	Sukawi	C. 1283 P.2 S.IV			Purwosari	Sayung	5.161	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.934	
82	H. Matrodhi	C. 969 P.75 S.IV			Purwosari	Sayung	5.586	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.690	
83	Achmad Nur	HM. 1015			Purwosari	Sayung	5.404	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.926	

84	H. Matrodhl	C. 968 P.75 S.IV			Purwosari	Sayung	5.586	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.114	
85	Rolwan	C. 1184 P,4 S.IV			Purwosari	Sayung	2.753	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	825	
86	Suparno	C. 1185 P.1 S.IV			Purwosari	Sayung	2.753	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	825	
87	Rolkan	C. 1184 P,4 S.IV			Purwosari	Sayung	4.953	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.859	
88	H. Soleh	HM. 579			Purwosari	Sayung	4.268	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.949	
89	H. Soleh	HM. 580			Purwosari	Sayung	4.327	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.982	
90	H. Soleh	HM. 1136			Purwosari	Sayung	4.395	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.958	
91	H. Soleh	HM. 866			Purwosari	Sayung	5.110	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.939	
92	H. Soleh	HM. 969	00114/Purwosari/2008	1109051400240	Purwosari	Sayung	5.291	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.924	
93	H. Sholeh	HM. 644			Purwosari	Sayung	6.201	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.422	
94	H. Sholeh	HM. 744			Purwosari	Sayung	4.663	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.299	
95	H. Achmad Nur	HM. 1022			Purwosari	Sayung	6.342	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.217	
96	H. Achmad Nur	HM. 379			Purwosari	Sayung	4.221	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.272	
97	H. Achmad Nur	HM. 1019			Purwosari	Sayung	5.079	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	2.281	
98	Sukawi	C. 284 P.3 S.V			Purwosari	Sayung	5.600	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	3.975	
99	Sukawi	C. 284 P.75 S.IV			Purwosari	Sayung	2.400	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	644	
100	H. Achmad Nur	C. 198 P.13 S.V			Purwosari	Sayung	1.092	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	1.189	
101	Sukawi	C. 282 P.10 S.V			Purwosari	Sayung	8.800	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Musnah	4.005	
102	Hj. Mujiatun	HM. 936			Purwosari	Sayung	5.281	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada		2014	
103	Siti Faridah	HM. 907	00038/Purwosari/2008	1109051400189	Purwosari	Sayung	5.028	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.583	
104	Hasan As'ari	HM. 906	00035/Purwosari/2008	1109051400186	Purwosari	Sayung	5.420	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.755	
105	Yatinah	HM. 878	064/Purwosari/2008	1109051400365	Purwosari	Sayung	5.676	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.842	
106	H. Achmad Nur	HM. 734	108/05.14/2005	1109051400111	Purwosari	Sayung	4.497	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.522	

107	Sukawi	C. 730 P.5 S.III			Purwosari	Sayung	4.935	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.568	
108	H. Achmad Nur	C. 926 P.70 S.II			Purwosari	Sayung	5.063	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.518	
109	Kawi	C. 1003 P.5 S.III			Purwosari	Sayung	2.473	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.534	
110	Rohwan	C. 1003 P.5 S.III			Purwosari	Sayung	2.473	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	258	
111	Zaedun	HM. 966	111/Purwosari/2008	1109051400237	Purwosari	Sayung	4.743	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.441	
112	H. Achmad Nur	HM. 1021	196/Purwosari/2008	1109051400403	Purwosari	Sayung	4.593	Tanah Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	1.128	
113	H. Achmad Nur	HM. 1021			Purwosari	Sayung			Tidak ada	Tidak ada	Tidak Musnah	244	



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

BERITA ACARA

Nomor : 590 / 0017925

**KONSULTASI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
TOL SEMARANG-DEMAK DI KABUPATEN DEMAK**

Berkaitan dengan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak maka pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016
Waktu : 09.30 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna UPTD Dikpora Kecamatan Sayung

Telah dilakukan Konsultasi Publik pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak yang dihadiri oleh pemilik tanah, tokoh masyarakat, warga terdampak, unsur terkait serta Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam daftar hadir undangan.

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Perubahannya.
2. Unsur Tim Persiapan Prov. Jateng :
 - a. Kanwil BPN Prov. Jateng;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng;
 - c. Biro Hukum Setda Prov. Jateng;
 - d. Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. Jateng;
 - e. Biro Administrasi Bangsa Setda Prov. Jateng;
 - f. Biro Keuangan Setda Prov. Jateng.
3. Unsur Pemerintah Kab. Demak :
 - a. Kantor Pertanahan Kab. Demak;
 - b. Pemerintah Kab. Demak;
 - c. Pemerintah Kecamatan Sayung;
 - d. Pemerintah Desa Sriwulan;
 - e. Pemerintah Desa Bedono;
 - f. Pemerintah Desa Purwosari;
 - g. Pemerintah Desa Sidogemah;
 - h. Pemerintah Desa Sayung;
 - i. Pemerintah Desa Loireng;
 - j. Pemerintah Desa Tambakroto.
4. Instansi yang memerlukan tanah :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



5. Materi dan Narasumber :

a. Pemerintah Kab. Demak :

1. Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dalam upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Mengharapkan bahwa warga masyarakat yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, untuk mendukung pembangunan tersebut mengingat pembangunan Jalan Tol merupakan Program Pemerintah untuk Kepentingan Umum dan warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan akan mendapatkan ganti rugi.

b. Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. Jateng (Tim Persiapan) :

- 1) Konsultasi publik merupakan tahapan lanjutan setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendataan awal oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 2) Tahapan ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Penetapan Lokasi pengadaan tanah oleh Gubernur.

c. Instansi yang Memerlukan Tanah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) :

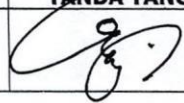
- 1) Konsultasi Publik merupakan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 2) Pada saat tahapan pendataan awal telah dilaksanakan pengumpulan data tanah baik dokumen kepemilikan maupun luasan bidang tanah dan penghitungan secara pasti akan dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan oleh lembaga pertanahan (Kantor Petanahan).

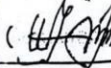
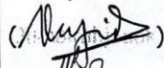
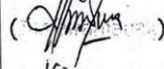
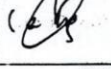
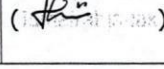
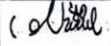
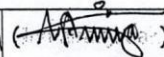
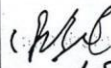
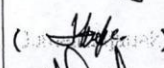
6. Dalam konsultasi publik pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kab. Demak, telah disepakati bahwa :

- a. Warga Desa Sriwulan, Desa Bedong, Desa Purwosari, Desa Sidogemah, Desa Sayung, Desa Loireng, Desa Tambakroto Kec. Sayung yang tanahnya terkena proyek sepakat/menyetujui tanahnya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Di Kab. Demak.
- b. Para pihak yang terdampak serta unsur terkait juga mendukung dan sepakat/menyetujui terhadap program pemerintah pembangunan Jalan Tol yang melewati daerahnya.
- c. Terhadap ukuran tanah pada surat sporadik yang dimiliki saat ini oleh pemilik tanah masih dapat berubah pada saat pengukuran yang akan dilakukan oleh pihak BPN/Kantor Pertanahan.
- d. Daftar hadir undangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Konsultasi Publik dan merupakan bentuk dukungan/persetujuan terhadap rencana pembangunan yang mengenai tanahnya.
- e. Terhadap Berita Acara Konsultasi Publik ditandatangani oleh perwakilan warga masing-masing Desa yang tanahnya terkena dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Tengah.

Sayung, 20 Oktober 2016

1. Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah :

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	AGUS HARIYANTO	Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. Jateng	

DESA SAYUNG		DESA LOIRENG	
1. Nursoleh	()	1. M. Qosim	()
2. Sunadi	()	2. Hartono	()
3. Umar	()	3. Mufid	()
4. Eni Setiowati	()	4. Ahmadi	()
5. Subroto	()	5. Sukron	()
DESA SIDOGEMAH			
1. Nurul Hidayah	()	6. Siti Alimah / Aminah	()
2. Sugiyanto	()	7. M. Basori	()
3. Sugiyono	()	8. Sumartono	()
4. Suyanto	()	9. Jumari	()
5. Jumirah	()	10. Badri	()

3. Tokoh Masyarakat/Unsur Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Desa.

TOKOH MASYARAKAT	
1. Kecamatan Sayung	()
2. Pemerintah Desa Sriwulan	()
3. Pemerintah Desa Bedono	()
4. Pemerintah Desa Purwosari	()
5. Pemerintah Desa Sidogemah	()

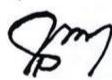


NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
2.	DJAROT S.	Kanwil BPN Prov. Jateng	
3.	HERU JONY S.	Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng	
4.	FERRI S.	Biro Adm. Bangda Setda Prov. Jateng	
5.	DIAH RAGIL	Biro Keuangan Setda Prov. Jateng	
6.	SUDIONO	Kementerian PU & Perumahan Rakyat	
7.	EDI DJATMIKO	Pemerintah Kab. Demak	
8	SUJADI	Kantor Pertanahan Kab. Demak	

2. Perwakilan Warga :

DESA SRIWULAN		DESA BEDONO	
1. Muh. Zazin	()	1. Sukri	()
2. Kaswadi	()	2. Tiyari/Ellis	()
3. M. Wakid	()		
4. Sukron Suroso	()		
5. Supriyanti	()		
DESA PURWOSARI		DESA TAMBAK ROTO	
1. Nur Azizah	()	1. Tohari	()
2. Maksum	()	2. Nurchoslm	()
3. Maskun	()	3. Saeen	()
4. Muksin	()	4. Yohanes Hendrawan	()
5. Khalil	()	5. Suprpto	()
H-S WALEH		MATHEUT	



TOKOH MASYARAKAT	
6. Pemerintah Desa Sayung	
7. Pemerintah Desa Loireng	
8. Pemerintah Desa Tambakroto	



Lampiran 8. Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B 3358/0.3/Gs/09/2019

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH S E M A R A N G

Nomor	: B- ³³⁵⁸ /0.3/Gs/09/2019	Semarang, ²⁰ September 2019
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Eksemplar	KEPADA YTH :
Perihal	: Pendapat Hukum terkait dengan Pembebasan tanah masyarakat dengan kondisi tergenang/tertutup air laut yang akan digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol-Semarang Demak terintegrasi Tanggul Laut.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI - <u>SEMARANG</u>

Sehubungan dengan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No. 180/0010804 tanggal 24 Mei 2019 Perihal Permohonan Pendapat Hukum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pembebasan lahan proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut terdapat fakta bahwa sebahagian bidang tanah yang akan dibebaskan dalam kondisi tergenang/tertutup air laut.
- Berdasarkan surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya seluruh Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah yang hilang secara alami baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya dan selanjutnya pemegang hak atas tanah tersebut tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila dikemudian hari di atas tanah bekas tersebut dilakukan reklamasi/ penimbunan dan atau pengeringan (*Polder*).
- Oleh karena dalam pembebasan lahan untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut tersebut sebahagian bidang tanah yang akan dibebaskan dalam kondisi tergenang/tertutup air laut maka pihak yang berhak menyatakan secara teknis dan spesifik masing-masing bidang tanah dengan kondisi tergenang/tertutup air laut tersebut merupakan tanah hilang karena abrasi adalah Badan Pertanahan Nasional dengan melibatkan instansi terkait lainnya antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Badan Informasi Geospasial Kementerian ATR BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah, Lembaga Akademisi.

Untuk lebih jelasnya terlampir Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang disusun oleh Tim Jaksa Pengacara Negara.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



YUNAN HARJAKA, SH, MH

JAKSA UTAMA Madya NIP. 19640318 199103 1001

TEMBUSAN:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 2. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jateng;
 3. Arsip.
-

KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

PENDAPAT HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PEMBEBASAN TANAH
MASYARAKAT DENGAN KONDISI TERGENANG/TERTUTUP AIR LAUT YANG AKAN DIGUNAKAN
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL- SEMARANG DEMAK TERINTEGRASI TANGGUL LAUT.

I. DASAR:

1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1068/O.3/Gs.2/07/2019 tanggal 25 Juli 2019 Untuk Membuat Pendapat Hukum (*Legal Opinion*).

II. DATA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan-Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 Tahun 2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Propinsi Jawa Tengah.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 355/KPTS/M/2017 tentang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak tanggal 30 Mei 2017.
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Mei 2018.
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah

9. Surat dari Plt. Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI No. 620/0003108 tanggal 22 Pebruari 2018 Perihal Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut kota Semarang dengan Jalan Tol Semarang-Demak.
10. Surat dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ka.BPN RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan Gubernur Jawa Tengah No. 435/200/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang /Demak.
11. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/780-33.21/4/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Konfirmasi Kelanjutan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak.

III. KASUS POSISI:

1. Bahwa dalam pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut, terdapat bidang tanah masyarakat dengan kondisi sudah tergenang/tertutup air laut.
2. Terhadap aspek kepemilikan dan/atau penguasaan atas bidang tanah masyarakat tersebut, telah bersertipikat dan/atau tercatat dalam buku Letter C desa setempat.
3. Perencanaan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut tersebut telah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 435/200/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan akan diakomodasi dalam Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Propinsi Tengah mohon pendapat hukum apakah dalam pembebasan tanah dengan ganti kerugian atas bidang tanah masyarakat dengan kondisi sudah tergenang/tertutup air laut untuk pembangunan bagi kepentingan umum dimaksud, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

IV. BATASAN PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dengan asumsi bahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemohon kepada Tim Jaksa Pengacara Negara adalah asli dan dokumen dokumen asli yang diperlihatkan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara adalah otentik serta dokumen dokumen yang diberikan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk foto copy atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya seta berdasarkan peraturan perundang undangan terkait.

2. Pendapat Hukum ini ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dan sama sekali tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam Pendapat Hukum.
3. Tim Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan sebagian atau seluruh Pendapat Hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon yang dipergunakan dalam penyusunan Pendapat Hukum.

V. PERMASALAHAN:

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Propinsi Tengah Nomor 180/0010804 tanggal 24 Mei 2019 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mohon pendapat hukum apakah dalam pembebasan tanah dengan ganti kerugian atas bidang tanah masyarakat dengan kondisi sudah tergenang/tertutup air laut untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

VI. ANALISIS:

Sebelum melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut di atas perlu kami sampaikan Gambaran Umum tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut sesuai dengan surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara No.536/P2T/500-33.74/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak terintegrasi Tanggul Laut telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak sebagai berikut :
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 Tahun 2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/38 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 tahun 2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/66 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 telah dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang Demak yang terintegrasi

dengan laut kepada masyarakat pemilik bidang tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah di Kantor Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

- Selanjutnya pada bulan April s/d Juni 2019 telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A & B berupa pengukuran dan pengumpulan data yuridis kepemilikan/penguasaan tanah sebagai berikut :
 - Lokasi pengadaan tanah berada di 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Terboyo Kulon dengan luas keseluruhan $\pm$ 290 Ha.
 - Status bidang tanah yang terdiri dari :
 - Bersertifikat (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai instansi Pemerintah) sejumlah $\pm$ 71 bidang;
 - Tanah Yasan/Letter C sejumlah $\pm$ 15 bidang;
 - Belum teridentifikasi sejumlah $\pm$ 43 bidang disebabkan belum bisa dilakukan pengukuran karena belum terpasangnya tanda batas serta sulitnya medan (berupa mangrove) dan juga masih ada sebahagian yang belum mengumpulkan bukti alas hak.
 - Kondisi fisik bidang tanah di lapangan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :
 - Tanah darat;
 - Tambak yang dibatasi dengan galengan/pematang berupa tanah, batu dan tumpukan karang pasir;
 - Tambak yang dibatasi dengan waring berupa jaring dengan ikatan bambu yang ditanam di tanah yang terendam air yang mengelilingi tambak;
 - Tanah yang sudah tidak diketahui batas bidang tanahnya karena tertutup air.
- Bahwa sampai dengan saat ini pemilik tanah masih mendapatkan tagihan pembayaran pajak dari Pemerintah Kota Semarang berupa SPPT- PBB setiap tahunnya.
- Bahwa tambak yang dibatasi dengan galengan/pematang maupun yang dibatasi dengan waring sampai saat ini masih dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya dan/atau petani tambak berupa budi daya ikan bandeng dan bawal yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Berikut ini akan kami sampaikan analisa tentang permasalahan dimaksud sebagai berikut:
Apakah dalam pembebasan tanah dengan ganti kerugian atas bidang tanah masyarakat dengan kondisi sudah tergenang/tertutup air laut untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU no 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum "(selanjutnya disebut UU no. 2 Tahun 2012)" yang dimaksud dengan Hak atas Tanah adalah Hak atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang undang.

- Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) menyatakan hak - hak atas tanah terdiri dari :

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hal tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

- Selain mengatur Hak- hak atas tanah, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 juga mengatur hapusnya hak hak atas tanah antara lain hapusnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagai berikut :

- Hapusnya Hak Milik :

Pasal 27 UUPA :

Hak Milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara;
 - 1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 - 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - 3. Karena ditelantarkan
 - 4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

- b. Tanahnya musnah.

- Hapusnya Hak Guna Bangunan:

Pasal 40 UUPA :

Hak Guna Bangunan hapus karena :

- a. Jangka waktunya berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;
- e. Ditelantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Ketentuan Pasal 40 UUPA ini selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996) yang memberikan ketentuan mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan.

Pasal 35 ayat (1) :

Hak Guna Bangunan hapus karena :

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir karena :
 - 1) tidak dipenuhinya kewajiban - kewajiban memegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 atau
 - 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang terutang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Tanah Hak Pengelolaan; atau
 - 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
- d. Dicabut berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. Ditelantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan Pasal 20 ayat (2).

• **Hapusnya Hak Pakai :**

Ketentuan mengenai hapusnya Hak Pakai dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan :

- (1) Hak Pakai hapus karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
 - b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
 - 1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/ atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52; atau
 - 2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
 - 3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
 - d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;

e. ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

g. ketentuan Pasal 40 ayat (2).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 40 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tersebut, jelas mengatur bahwa salah satu alasan hapusnya hak-hak atas tanah adalah karena tanahnya musnah.
- Tanah musnah dapat terjadi baik karena peristiwa alam maupun karena akibat ulah manusia, padahal di sisi lain memelihara tanah adalah merupakan kewajiban pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan :
"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah".
- Berkaitan dengan pembebasan lahan untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut bahwa pelaksanaannya menggunakan Undang undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Pasal 1 angka 4 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan bahwa Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
Sedangkan yang dimaksud dengan ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. (Pasal 1 butir 22 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012).
- Mengenai ganti rugi, Pasal 9 ayat (2) UU no. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang perbidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 UU No 2 Tahun 2012) Sedangkan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti sisa. (Penjelasan Pasal 33 huruf f UU No. 2 Tahun 2012).
- Bahwa faktanya pembebasan lahan untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut terdapat sebagian tanah darat dan sebagian lagi tanah yang tergenang/ditutupi oleh air laut.
- Bahwa kondisi tanah yang tertutup dengan air laut secara umum disebut dengan istilah Abrasi.

- Abrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan.
- Abrasi secara umum adalah proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh aktivitas gelombang laut arus laut, serta pasang surut air laut yang berakibat pada penurunan permukaan tanah dan tergenangnya permukaan tanah tersebut oleh air laut, sehingga akibatnya garis pantai mengalami perubahan.
- Bahwa mengenai tanah darat pemilik tanah berhak memperoleh ganti rugi yang layak dan adil sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Sedangkan khusus pembayaran ganti rugi mengenai tanah-tanah yang tergenang/tertutup oleh air laut, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya seluruh Indonesia menyebutkan :

- "1. Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan atau pengeringan (*polder*).
2. Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
3. Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah yang hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.
5. Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

- Mencermati Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tersebut, pada angka 1 jelas menyebutkan bahwa tanah-tanah yang hilang secara alami, antara lain karena abrasi pantai, tenggelam maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan atau pengeringan (polder).
- Selanjutnya pada angka 4 Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tersebut diminta agar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah yang hilang yang terjadi secara alami dan untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan.
- Bahwa mengingat pembebasan lahan untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut terdapat sebahagian bidang tanah dengan kondisi sudah tergenang/tertutup air laut (abrasi), maka satu-satunya pihak yang berhak menentukan tanah tersebut tanah abrasi adalah Pihak Badan Pertanahan Nasional selaku instansi teknis yang secara spesifik menyatakan masing-masing bidang tanah tersebut adalah tanah hilang karena abrasi dengan melibatkan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Geospasial Kementerian ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Akademisi dan instansi terkait lainnya.
- Pihak Badan Pertanahan Nasional agar melakukan inventaris terhadap masing-masing bidang tanah yang tertutup/tergenang air laut dan menyatakan status bidang tanah tersebut musnah dengan disertai alasan/penjelasannya.

VII. KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembebasan lahan proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut terdapat fakta bahwa sebahagian bidang tanah yang akan dibebaskan, tergenang/tertutup air laut (abrasi).
- Berdasarkan surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia menyebutkan tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya dan selanjutnya pemegang hak atas tanah tersebut tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas tanah bekas tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan atau pengeringan (Polder)

- Bahwa pembebasan lahan untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut terdapat sebahagian bidang tanah dengan kondisi sudah tergenang/tertutup air laut (abrasi), maka pihak yang berhak menentukan masing-masing bidang tanah tersebut merupakan tanah abrasi adalah Badan Pertanahan Nasional selaku instansi teknis yang secara spesifik menyatakan tanah tersebut adalah tanah hilang karena abrasi dengan melibatkan instansi terkait lainnya antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial Kementerian ATR BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah, Lembaga Akademisi serta Instansi terkait lainnya.
- Pihak Badan Pertanahan Nasional menginventarisir masing-masing bidang tanah yang tertutup/tergenang air laut dan menyatakan status bidang tanah tersebut musnah dengan disertai alasan/penjelasan musnahnya tanah tersebut.

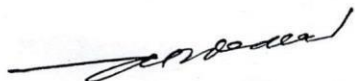
VIII. SARAN :

Mengingat proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi Tanggul Laut adalah termasuk dalam proyek strategis nasional, maka Badan Pertanahan Nasional segera menentukan status masing-masing bidang tanah yang tergenang/tertutup air laut tersebut apakah tanah tersebut tergolong tanah abrasi.

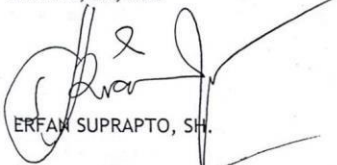
Demikian pendapat hukum ini dibuat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 10 September 2019

TIM JAKSA PENGACARA NEGARA



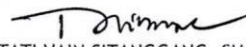
ASNAWI, SH, MH.



ERFAN SUPRAPTO, SH.



GUNTORO JANGKUNG W, SH.



TATI VAIN SITANGGANG, SH, MH.



ARFAN TRIONO, SH.



TEGUH SUPRIYONO, SH.

Lampiran 9. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/2075-33/X/2020



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Telp. 8310388 - 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax. 8310392
Web : www.jateng.bpn.go.id Email : jateng@bpn.go.id

Semarang, 26 - 10 - 2020

Nomor : AT.02.01/2075-33/X/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) eksemplar
Perihal : Mohon Petunjuk terkait
Percepatan Penyelesaian Ganti
Kerugian Atas Tanah Tanah
Masyarakat dengan Kondisi
Tergenang / Tertutup Air Laut
yang Akan Digunakan Untuk
Pembangunan Jalan Tol Semarang
- Demak Terintegrasi Tanggul Laut

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
di
JAKARTA

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 22 Oktober 2020, bertempat di Ruang Rapat Lt.6 Hotel Novotel Jl. Pemuda NO. 123 Sekayu, Kota Semarang yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi bersama ini dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang - Demak terintegrasi tanggul laut meliputi :
 - a. 2 (Dua) Kabupaten/Kota, 5 (lima) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) Desa/Kelurahan dengan rincian :
 - 1). Kota Semarang, 1 Kecamatan (Kecamatan Genuk) dan 3 Kelurahan;
 - 2). Kabupaten Demak, 4 Kecamatan dan 18 Desa/Kelurahan (Kecamatan Sayung, 7 Desa; Kecamatan Karangtengah 7 Desa; Kecamatan Wonosalam 3 Desa dan Kecamatan Demak 1 Kelurahan);
 - b. 2 (dua) bentang alam yaitu tanah darat dan tanah tergenang/terendam air laut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kota Semarang
 - a. Tanah Darat sejumlah 11 bidang seluas 47,39 Ha;
 - b. Tanah Tergenang / terendam air sejumlah 115 bidang seluas 247,59 Ha dengan rincian :

- b.1. Tanah tergenang / tertutup air dan masih aktif dimanfaatkan untuk tambak sejumlah 85 bidang seluas 183,84 Ha (35 bidang tambak dibatasi dengan galengan, batu dan tumpukan pasir, 50 bidang tambak yang dibatasi dengan waring) dan dalam peta ditunjukkan dalam warna hijau  dan kuning  (peta dan daftar nominatif terlampir);
 - b.2. Tanah tergenang / tertutup air yang sudah tidak dimanfaatkan dan tidak diketahui batasnya sejumlah 30 bidang seluas 63,75 Ha dalam peta ditunjukkan dengan bidang tanah berwarna biru  (peta dan daftar nominatif terlampir);
- 2) Kabupaten Demak
- a. Tanah Darat sejumlah 1.351 bidang seluas 146,34 Ha (termasuk tanah fasum dan fasos sejumlah 144 bidang);
 - b. Tanah Tergenang sejumlah 292 bidang seluas $\pm$ 99,91 Ha dengan rincian :
 - b.1. Tanah tergenang / tertutup air dan masih ada pemukiman dan aktif dimanfaatkan untuk tambak dengan batas waring dan pohon bakau sejumlah 90 bidang seluas $\pm$ 18,6 Ha (batas waring tersebut tidak menunjukkan batas kepemilikan sebenarnya setelah di overlay dengan data peta citra sebelum terendam) dalam peta ditunjukkan dengan bidang tanah berwarna pink  (peta terlampir);
 - b.2. Tanah tergenang / tertutup air yang sudah tidak dimanfaatkan dan tidak diketahui batasnya sejumlah 202 bidang seluas $\pm$ 81,31 Ha dalam peta ditunjukkan dengan bidang tanah berwarna biru  (peta terlampir);
2. Bahwa progres kegiatan pengadaan tanah untuk obyek pengadaan tanah berupa tanah tergenang telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B namun belum dapat diumumkan karena menunggu kepastian apakah dapat diberikan ganti kerugian ataukah tidak sedangkan progres pengadaan tanah Jalan Tol Semarang – Demak Terintegrasi Tanggul Laut untuk obyek pengadaan tanah berupa tanah darat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :
- a. Kota Semarang dengan target 11 bidang seluas 47,39 Ha, sudah dibayar ganti ruginya sejumlah 5 bidang (45,45%), seluas 4,94 Ha (10,4%) dengan nilai ganti kerugian Rp. 189.903.601.000, sisanya Sudah dilakukan penilaian namun belum lolos verifikasi oleh LMAN sejumlah 5 bidang seluas 42,45 Ha direncanakan dalam tahun ini sudah dapat dibayarkan ganti kerugiannya;

/b. Kabupaten...

- b. Kabupaten Demak dengan target 1.351 bidang seluas 146,34 Ha, sejumlah 898 bidang telah dimusyawarahkan 159 bidang belum sepakat dan 739 bidang sepakat, dari 739 bidang sepakat sejumlah 362 bidang (27,52%), seluas 22,82 Ha (15,59%) sudah dibayar ganti ruginya dengan nilai ganti kerugian Rp. 191.458.072.069,- (sejumlah 377 bidang masih mengajukan permohonan pembayaran), sisanya sejumlah 453 bidang akan dimusyawarahkan secara bertahap sampai dengan tanggal 27 November 2020 dan pembayaran ganti kerugian terakhir akan dilaksanakan pada awal Bulan Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa *salah satu hapusnya hak kepemilikan atas tanah antara lain karena tanahnya musnah*;
4. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 09 Mei 1996 perihal Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi dinyatakan bahwa *tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (land slide) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/ penimbunan dan/atau pengirangan (polder)*;
5. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 09 Januari 2020 Nomor BP.02.01/76-600/1/2020 perihal Mohon petunjuk sehubungan dengan telah diterbitkannya Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait dengan Pembebasan Tanah Masyarakat dengan Kondisi Tergenang / Tertutup Air Laut yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Jalan - Tol Semarang Demak terintegrasi Tanggul Laut menyatakan bahwa *terhadap tanah masyarakat dengan kondisi tergenang/tertutup air laut, yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang Demak terintegrasi Tanggul Laut, maka tanahnya dinyatakan musnah/hilang dan haknya menjadi hapus dengan sendirinya sehingga hak keperdataannya menjadi hilang bersama dengan fisik bidang tanahnya sehingga tidak dapat diberikan ganti rugi*;
6. Bahwa sesuai hasil rapat tanggal 22 Oktober 2020, bertempat di Ruang Rapat Lt.6 Hotel Novotel Jl. Pemuda NO. 123 Sekayu, Kota Semarang yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi progres pengadaan tanah Jalan Tol Semarang - Demak Terintegrasi Tanggul Laut menyatakan bahwa :

/a. "terhadap...

- a. "terhadap bidang tanah yang telah terendam /tergenang air laut dan fisik dilapangan digunakan /dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak bandeng, udang dan rumpôn kerang dengan batas bidang penguasaan berupa galengan, batu dan tumpukan pasir, bambu waring dan dapat dibuktikan dibuat/didirikan di atas tanah kepemilikan sendiri baik diatas tanah Hak Milik Adat ataupun tanah Hak Miliknya **dapat diberikan ganti kerugian**"
 - b. "terhadap bidang tanah yang telah terendam tergenang air laut dan fisik dilapangan tidak dapat ditunjukkan batas bidang tanahnya secara pasti dan secara fisik juga tidak digunakan / dimanfaatkan oleh masyarakat baik terhadap tanah yang berstatus Hak Milik Adat atau bahkan yang telah bersertipikat Hak Milik **tidak dapat diberikan ganti kerugian karena tanahnya dinyatakan musnah/hilang dan hak atas tanahnya telah hapus dengan sendirinya.**"
 - c. "terhadap bidang tanah di Kabupaten Demak yang saat ini telah terendam / tergenang air laut di luar yang digunakan untuk ROW jalan Tol Semarang – Demak dan kolam retensi dan berpotensi menjadi kering apabila Jalan Tol Semarang – Demak terintegrasi Tanggul Laut terbangun maka terhadap seluruh bidang tanah yang saat ini tergenang baik yang digunakan langsung untuk ROW jalan Tol maupun kolam retensi maupun yang tidak digunakan dan berpotensi menjadi tanah kering maka seluruhnya akan ditata ulang dengan Konsolidasi Tanah apabila tanah kering yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan jalan tol Semarang – Demak terintegrasi tanggul laut sudah ada/terwujud."
7. Bahwa untuk melaksanakan penyelesaian dengan Konsolidasi Tanah dengan tahap – tahap sebagai berikut :
- a. Kegiatan Relokasi dan Konsolidasi Tanah dilaksanakan setelah seluruh kegiatan pengadaan tanah dan Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Terintegrasi Tanggul Laut selesai dilaksanakan;
 - b. Pemerintah Daerah menyiapkan *Site Plan* atas tanah kering yang ditimbulkan dari dibangunnya Jalan Tol Semarang - Demak Terintegrasi Tanggul Laut dengan skala prioritas sebagai berikut :
 - 1) Fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat;
 - 2) Kantor pelayanan publik dan Keperluan pemerintah lainnya;
 - 3) Masyarakat bekas pemegang hak yang tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan tol dan tidak mendapatkan ganti kerugian;
 - 4) Masyarakat bekas pemegang hak lainnya.
 - c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Konsolidasi Tanah sesuai *Site Plan* Pemerintah Daerah yang telah disepakati oleh masyarakat bekas pemegang hak.
8. Bahwa terkait hal-hal tersebut di atas agar tidak menimbulkan beda penafsiran antara pelaksana pengadaan tanah dan aparat penegak hukum dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi pelaksana pengadaan tanah serta agar pelaksana kegiatan merasa terayomi dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan agar tidak menimbulkan permasalahan serta gugatan perdata maupun pidana kami mohon kepada Bapak Menteri untuk dapat memberikan payung hukum yang tepat agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan aman terkait dengan :

/a.. Kepastian...

- a. Kepastian ganti kerugian terhadap bidang tanah yang telah terendam /tergenang air laut dan masih dapat ditunjukkan batas bidang tanahnya sesuai dengan bukti kepemilikan Hak Milik Adat ataupun sertipikat Hak Miliknya serta fisik dilapangan digunakan / dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak, **apakah dapat diberikan ganti kerugian terhadap tanah dan usaha tambaknya ataukah hanya untuk usahanya saja;**
- b. Apabila poin huruf (a) di atas hanya dapat diberikan ganti kerugian untuk usahanya saja kepada siapa ganti kerugian di berikan mengingat pemilik usaha tambak dengan pemilik hak atas tanahnya berbeda;
- c. Bahwa terhadap bidang tanah yang telah terendam tergenang air laut dan fisik dilapangan tidak dapat ditunjukkan batas bidang tanahnya secara pasti dan secara fisik juga tidak digunakan / dimanfaatkan oleh masyarakat baik terhadap tanah yang berstatus Hak Milik Adat atau bahkan yang telah bersertipikat Hak Milik tidak dapat diberikan ganti kerugian karena tanahnya dinyatakan musnah/hilang dan hak atas tanahnya telah hapus dengan sendirinya, **siapakah yang berwenang menyatakan tanahnya musnah dan bagaimana prosedur penghapusan hak atas tanahnya?**

Demikian yang dapat kami sampaikan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri berkenan untuk memberikan arahan dan petunjuk lebih lanjut.



Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah

I. Englin Sari, M.Si
NIP. 19690418 199503 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta
5. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
6. Walikota Semarang di Semarang;
7. Bupati Demak di Demak;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang di Semarang;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak di Demak.
10. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Tanggul Laut Semarang - Demak di Semarang.

**Lampiran 10. Surat Menteri ATR/BPN No.410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Perihal
Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi**



MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 9 Mei 1996

Nomor : 410-1293
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Status Tanah
Timbul dan Tanah
Reklamasi.

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kab./Kodya.
di -

SELURUH INDONESIA

Akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari beberapa pihak mengenai status tanah-tanah timbul, tanah reklamasi dan juga tanah reklamasi di atas bekas tanah hak yang hilang karena abrasi atau terkena bencana alam lainnya.

Untuk menertibkan tanah-tanah tersebut, sesuai dengan kewenangan Saudara, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (land slide) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapa-pun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (polder).
2. Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
3. Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.
5. Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian petunjuk penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi ini disampaikan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan secara berkala mengenai penanganan tanah-tanah timbul tersebut kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).
2. Yth. Saudara-saudara para Menteri Kabinet Pembangunan VI.